

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1200 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1742 Tahun 2019, dan berakhir masa berlakunya;
 - b. bahwa pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat sisa yang belum selesai pengadaannya dan terdapat perubahan rencana jalan tol serta sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga untuk kelanjutannya perlu penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran 2012 Republik Indonesia Tahun Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan Pengadaan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER.

KESATU

: Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter yang melewati Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Duri

Pulo, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang ± 20,33 km (lebih kurang dua puluh koma tiga tiga kilometer) dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) sesuai lampiran peta Nomor 66/B/P/PPSR/ DCKPRP/VII/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.

KETIGA

: Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

KEEMPAT

: Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.

KELIMA

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban prasarana dan sarana umum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).

KEENAM

: Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020

UBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- 4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 5. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 11. Walikota Jakarta Barat
- 12. Walikota Jakarta Pusat
- 13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 19. Camat Kalideres
- 20. Camat Cengkareng
- 21. Camat Kembangan
- 22. Camat Kebon Jeruk
- 23. Camat Grogol Petamburan
- 24. Camat Tambora
- 25. Camat Taman Sari
- 26. Camat Gambir
- 27. Camat Sawah Besar
- 28. Camat Kemayoran
- 29. Lurah Kalideres
- 30. Lurah Semanan
- 31. Lurah Duri Kosambi
- 32. Lurah Cengkareng Barat
- 33. Lurah Cengkareng Timur

- 34. Lurah Rawa Buaya
- 35. Lurah Kedaung Kaliangke
- 36. Lurah Duri Kepa
- 37. Lurah Kedoya Utara
- 38. Lurah Jelambar
- 39. Lurah Grogol
- 40. Lurah Duri Pulo
- 41. Lurah Tanah Sereal
- 42. Lurah Duri Selatan
- 43. Lurah Kali Anyar
- 44. Lurah Grogol
- 45. Lurah Krukut
- 46. Lurah Maphar
- 47. Lurah Petojo Utara
- 48. Lurah Kebon Kelapa
- 49. Lurah Pasar Baru
- 50. Lurah Gunung Sahari Utara
- 51. Lurah Gunung Sahari Selatan
- 52. Lurah Kebon Kosong
- 53. Lurah Serdang